

PERKEMBANGAN INTELEKTUAL PADA MASA DINASTI BUWAIHI

Mohd. Nasir

Abstraksi

Perkembangan ilmu pada masa dinasti Buwaihi adalah konsekwensi logis dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berjalan lama. Mulai dari usaha penerjemahan, keterbukaan terhadap budaya lain dan pergesekan antara berbagai aliran pemikiran yang terjadi dalam umat Islam sendiri. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti bani Buwaihi. Pertama, tumbuhnya kota-kota ilmu dan budaya. Selain Bagdād sebagai kota besar, muncul pula kota-kota lain seperti, Cordova, Kairo dan Bukhara. Di daerah bani Buwaihi juga muncul kota ilmu pengetahuan selain Ba rah dan Kufah, yaitu Rayy, I fahān dan Syirāz. Kedua, maraknya majelis-majelis ilmu yang didirikan oleh berbagai amir dan wazīr. Majelis ilmu ini dapat dikelompokkan kepada 3 bentuk: majlis al-umara', majelis al-wuzara' dan majelis al-ulama. Ketiga, perpustakaan dan Dar al-ilm. Para ulama dan wuzara' serta banyak orang kaya berlomba-lomba mendirikan perpustakaan dan Dar al-ilm.

Kata Kunci: Intelektual dan Dinasti Buwaihi

A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan dinasti Buwaihi terus berkembang seperti masa sebelumnya, walaupun situasi politik tidak stabil. Seolah-olah ilmu pengetahuan dan politik berbanding terbalik (Amin, 1962: 2-3). Ketika politik tidak stabil, ilmu pengetahuan malah lebih maju dan matang dari waktu sebelumnya. Oleh sebab itu pendapat yang mengkategorisasikan sejarah Islam dalam berbagai periodisasi tidak dapat diterapkan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun kekuasaan politik berakhir dengan munculnya kekuasaan dinasti lain, namun perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan berhenti dengan hilangnya kekuasaan politik.

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan akan terus berlanjut seiring dengan aktifitas pengkajian dan penelitian yang dilakukan para ulama. Para ulama, sastrawan dan filosof yang muncul di masa dinasti Buwaihi merupakan kebanggaan umat,

sehingga pada masa ini tumbuh berbagai kota pusat ilmu pengetahuan seperti Bagdad, Basrah dan Kufah di Irak, Rayy dan Ishfahan di Persia. Diantara ilmuan yang muncul pada masa bani Buwaihi adalah al-Farabi, Ibn Sina, al-Farghani, Abd. Rahman as-Shufi, Ibn Miskawaih, Abu al-a'la al-Ma'ari dan kelompok ikhwan ash-Shafa.

Tulisan ini mencoba menguraikan perkembangan intelektual pada masa dinasti Buwaihi yang meliputi lembaga pendidikan, ulama dan ilmu pengetahuan itu sendiri pada masa dinasti Buwaihi, yang merupakan keturunan Persia. Selain itu, penting dicermati faktor pendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, di tengah kondisi politik yang tidak stabil.

B. Mengenal Bani Buwaihi

Kemunculan Dinasti Buwaihi dalam pentas sejarah sangat tidak diduga, karena asal usulnya yang tidak populer dalam panggung sejarah Islam. Dinasti ini didirikan oleh tiga orang bersaudara, yaitu 'Ali, asan dan A mad dari keluarga Abū Syuza' Buwaihi bin Fanakhsarū. Menurut ibn al-A'ir, mereka bukanlah penduduk asli Dailam, akan tetapi mereka telah lama tinggal di Dailam. Ayah mereka, Buwaihi bin Fanakhsarū bergelar Abū Syujā adalah seorang rakyat miskin di kampung Kayakis, Dailam, yang bekerja sebagai nelayan. (al-A'ir, 1966: 87-88). Dailam adalah sebuah negeri yang terletak di sebelah barat daya laut Kaspia yang telah berada di bawah kekuasaan Islam semenjak zaman 'Umar ibn Kha'ab (Mufradi, 1997: 123).

Mereka memulai karirnya sebagai tentara biasa di Dailam dan mengabdikan pada Banī Samāniyah. Lalu mereka bergabung dengan balatentara pimpinan Mardawij ibn Zayyar. Awal Dinasti Buwaihi muncul dalam pentas kekuasaan adalah ketika salah seorang dari mereka, 'Ali ibn Buwaihi, diangkat sebagai gubernur wilayah al-Karaj, sebuah wilayah di barat daya amdzān.

Pada tahun 332/943 Mardawij terbunuh, 'Ali (saudara tertua) pun sudah berkuasa di Isfahan. Pada masa ini banyak terjadi teror, perampokan dan penjarahan kota-kota besar seperti Ba'rah, Ahwāz dan Wāsi. Selain itu muncul pula pemberontakan-pemberontakan dari sekte-sekte lain. Dalam kondisi kekacauan seperti inilah, ketiga bersaudara berhasil memperluas kekuasaan mereka sampai sebagian besar daerah Persia sebelah barat dan barat daya. A mad ibn Buwaihi, yang termuda, berada di khuzistān dan al-Ahwāz,

berbatasan dengan sebelah timur Ba rah dan Wāsi . Ini berarti A mad berada dalam posisi memasuki kota Bagdād.

Pada tahun 334/938, A mad ibn Buwaih mendapat undangan dari khalifah al-Mustakfi untuk memasuki kota Bagdād. Sepertinya khalifah merasa bahwa A mad ibn Buwaih akan menjadi penyelamat kondisi sosial kota Bagdād yang sudah tidak menentu. Kedatangan A mad ibn Buwaih pun disambut hangat oleh khalifah Abbasiyah dan diangkat menjadi *Amir al-Umara'* dengan gelar *Mu'iz ad-Daulah* (pembela negara). Sementara dua saudaranya, 'Ali ibn Buwaih diberi gelar *Imad ad-Daulah* (tiang negara) dan asan ibn Buwaih mendapat gelar *Rukn ad-Daulah* (pilar negara) (al-A ĩr, 1966: 206-208)

Mereka menuntut agar gelar-gelar tersebut selalu disebut dalam setiap kesempatan mengiringi nama mereka. Gelar-gelar tersebut menjadikan mereka tidak saja diakui sebagai pemegang kekuasaan politik pemerintahan tetapi juga memiliki kedudukan yang setara dengan khalifah itu sendiri, sehingga kedudukan *amir al-umara'* tidak lagi berarti bagi mereka.

Selain itu, gelar-gelar ini juga menimbulkan *image* positif di kalangan massa Sunni terhadap penguasa Dinasti Buwaihi yang dianggap sebagai penyelamat institusi kekhalifahan Sunni di Bagdād. Akibatnya, perlawanan massa Sunni terhadap Dinasti Buwaihi menjadi semakin lemah dan memaksa para khalifah untuk tidak mempunyai alternatif lain kecuali bersikap pasrah sambil menunggu hari-hari ketidakberdayaan menghadapi perlakuan semena-mena dari para penguasa Dinasti Buwaihi di dalam istana mereka sendiri.

Mulanya, dengan diundangnya bani Buwaihi dan pemberian gelar-gelar ini, khalifah berharap akan terjadi pemulihan kekuasaan politik khalifah serta kestabilan politik di kota Bagdād. Namun realitanya sangat jauh berbeda. Fenomena sosial politik yang memberikan peluang untuk berdirinya kekuasaan Buwaihi ini, benar-benar dimanfaatkan oleh 3 (tiga) bersaudara. Mereka menjadikan momentum tersebut untuk meraih kekuasaan politik khalifah. Berbagai tindakan kekerasan mereka lakukan untuk melumpuhkan kekuasaan khalifah. Sejak saat itu, kekuasaan pemerintahan Dinasti Abbasiyah sepenuhnya dikuasai oleh Dinasti Buwaihi.

Dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah tampil berkuasa memasuki Bagdād, selanjutnya secara *de facto* roda pemerintahan di tangan para sultan Dinasti Buwaihi dan khalifah tinggal namanya saja. Keadaan khalifah lebih buruk dari pada sebelumnya. Kekuasaan agama dan rohani tidaklah berjalan dengan mulus,

terutama karena bani Buwaihi adalah penganut Syiah I nā Asy'ariyah sementara khalifah bani Abbas beraliran Sunni. Memang, mereka tetap mengakui bani Abbas menjadi khalifah, akan tetapi mereka tidak memiliki komitmen terhadap khalifah.

Keuangan negara, pemerintahan dan militer seluruhnya berada di tangan bani Buwaihi. Khalifah tidak mempunyai pengaruh apapun, selain penyebutan nama dalam khutbah dan pada mata uang serta menerima kunjungan para duta serta berbagai utusan dengan memakai pakaian kehormatan dalam acara-acara seremonial. Hal ini pun dilakukan penguasa bani Buwaihi demi kepentingan politik dan memelihara kehormatan khalifah di muka umum sekaligus akan memberikan legalitas kekuasaan bani Buwaihi terhadap pemerintahan. Bahkan semula A mad ibn Buwaih, berkeinginan untuk mengganti khilafah Abbasiyah dengan khilafah 'Alawiyah, namun dibatalkan karena pertimbangan politis.

Mereka memilih untuk mempertahankan institusi kekhalifahan Abbasiyah, karena mereka cukup aman sebagai penguasa di balik layar yang mengendalikan kekhalifahan sesuai dengan kepentingan mereka. Apabila mereka mengklaim bahwa kekhalifahan milik mereka, pastilah mereka akan mendapatkan perlawanan dari massa Sunni. Hal ini tentulah amat merugikan kepentingan mereka dan mengancam kedudukan yang selama ini mereka nikmati. Logika seperti ini, mendorong mereka secara tegas menolak ajakan penguasa Dinasti Fā'imiyah di Kairo, untuk bersama-sama membangun kekhalifahan Syiah (Fatimiyah) untuk menghadapi kekhalifahan Abbasiyah dan Amawiyah di Andalusia.

Bani Buwaihi mengangkat dan menurunkan siapa saja dari kekhalifahan sesuai dengan keinginan mereka. Mu'iz ad-Daulah, A mad ibn Buwaih menangkap khalifah al-Mustakfi beberapa minggu setelah ia berkuasa di Bagdād pada tahun 334/938. Ia menurunkan al-Mustakfi dari jabatan khalifah dan menggantinya dengan al-Mū i' (al-A īr, 1966: 126). Sebagai khalifah, pada mulanya al-Mū i' menerima dana dari A mad ibn Buwaih untuk kehidupannya sebesar 1.000 dirham perhari atau setara dengan Rp. 43.200.000. Namun setelah menguasai Ba rah, ia pun memperkecil dana tersebut. A mad ibn Buwaih hanya memberikan khalifah al-Mū i' beberapa bidang tanah untuk kehidupan khalifah serta menunjuk seorang sekretaris khalifah yang bertugas mengurus semua pekerjaan khalifah.

Pada tahun 344/948 A mad al-Buwaihi mengangkat anaknya, 'Izzu ad-Daulah, Bakhtiyār sebagai *Amir al-Umarā'*. 'Izzu

ad-Daulah juga bersikap seperti ayahnya. Ia menggulingkan khalifah al-Mū'ī dan menggantinya dengan a - ā'ī pada tahun 363/967. Pada tahun 381/985 peristiwa yang sama juga berulang kembali. Khalifah a - ā'ī diturunkan oleh Bahā' ad-Daulah lalu dibai'atlah al-Qādir Billāh menjadi khalifah. Pada masa Bahā' ad-Daulah, pengaruh bani Buwaihi semakin kuat, namun khalifah al-Qādir berhasil menunjuk anaknya al-Qā'im sebagai pengganti dirinya, walaupun kekuasaan sesungguhnya berada dalam genggamannya bani Buwaihi (Miskawih, tt: 58).

Situasi dan kondisi kekhalifahan Abbasiyah di bawah dominasi para sultan Dinasti Buwaihi ini terus berlanjut dan hampir tidak ada peluang untuk dapat melepaskan diri dari cengkeraman Dinasti Buwaihi. Peluang ini baru nampak ketika muncul kekuatan baru, Dinasti Ghaznawiyah di bawah kepemimpinan Yamin ad-Daulah Ma mud al-Ghaznawi, yang baru saja kembali dari benua India melalui Iran dan menguasainya. Kedatangan kekuatan baru yang membayangkan-bayangi kekuatan Dinasti Buwaihi di Rai dan Asfahan ini membuka harapan para khalifah Abbasiyah untuk dapat melepaskan diri dari cengkeraman penguasa Buwaihiyah.

Harapan untuk melepaskan diri dari penguasa Buwaihi mulai terkuak pada masa kekhalifahan al-Qādir (381/991 - 422/1031) dan kembali bertambah kuat pada masa al-Qā'im (422/1031 - 467/1075) karena adanya dukungan moral dari al-Māwardī sebagai tokoh besar di masa itu, yang berusaha meletakkan pemikiran dan landasan-landasan hukum yang kuat bagi kedudukan khalifah. Disamping itu, perpecahan yang terjadi antar penguasa Dinasti Buwaihi serta keberhasilan al-Qā'im melalui al-Māwardi menjadi mediator dalam menyelesaikan pertikaian antara para penguasa saat itu juga ikut berpengaruh. Keberhasilan al-Māwardi dalam bernegosiasi dengan para penguasa Buwaihi ini, mampu menegakkan kembali wibawa khalifah yang tengah merosot. Al-Māwardī pun akhirnya berhasil meminta para penguasa Dinasti Buwaihi untuk merelakan salah satu jabatan "wazir" kepada seorang yang beraliran Sunni, yaitu ibn Muslimah (al-A'ir, 1966: 600)

Pada tahun 447/1055, khalifah al-Qā'im mengundang kekuatan militer Tugril Beg Dinasti Saljūq Turki untuk memasuki kota Bagdād. Maka Dinasti Saljūq yang beraliran Sunni tersebut berhasil menguasai Bagdād setelah mengalahkan Dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah. Pergeseran kekuasaan ini belum juga mampu mengembalikan kekuasaan dan kewibawaan khalifah Abbasiyah yang terampas. Setelah kekuatan Dinasti Saljūq mampu menggusur kekuatan Dinasti Buwaihiyah, maka kekuasaan politik kekhalifahan

Abbasiyah segera didominasi oleh penguasa Dinasti Saljūq. Di bawah dominasi kekuasaan Dinasti Saljūq, kedudukan khalifah hanyalah sekedar simbol pemersatu tanpa kekuasaan politik yang berarti. Namun, posisi aliran keagamaan dan kedudukan khalifah lebih baik setelah Dinasti Saljūq berkuasa, karena Dinasti Saljūq juga beraliran Sunni, sama seperti khalifah. (Syalabī, 1974: 422).

Fakta-fakta historis di atas mengungkapkan bahwa meskipun kekhalifahan hanya sebagai simbol dan tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan secara politik, akan tetapi, sistem kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam menjaga, menegakkan ajaran Islam serta mengatur urusan keduniaan, tetap merupakan kesadaran politik bersama umat Islam pada masa itu. Sehingga khalifah tetap dipanggil sebagai *Amir al-Mukminin*, gelar yang dipergunakan khalifah sejak masa khalifah ‘Umar ibn Kha ab.

C. Situasi Sosial, Politik, dan Keagamaan

Tingginya heterogenitas penduduk, budaya dan agama di kota Bagdād tentunya memunculkan karakter yang beragam serta tingkat dinamika yang sangat tinggi. Hal ini selanjutnya berdampak terhadap terciptanya berbagai kelas kehidupan masyarakat yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelas aristokrat, yaitu para khalifah, sultan, perdana menteri, *amir al-umara'*, pegawai tinggi negara, pengusaha kelas atas, petani-petani besar dan pemilik properti.
- b. Kelas menengah, terdiri dari para pedagang, pejabat kelas menengah, hakim, ulama dan pegawai keuangan, militer dan pengadilan.
- c. Kelas masyarakat kecil yang terdiri dari pada tukang, petani, buruh dan pembantu.

Penghasilan masyarakat kelas aristokrat sangatlah besar. Harta mereka peroleh dari berbagai sumber dan mereka pun membelanjakan hartanya dengan boros. Walaupun kekuasaan politik khalifah dalam posisi lemah, namun dia adalah kepala negara yang diakui seluruh pemerintah, termasuk pemerintahan dinasti yang otonom. Karenanya, seluruh pelosok negeri Islam tetap mengirim pajak (*kharrāj*) ke pusat kekhalifahan. Namun sayang, para khalifah dan wanita-wanita sangat boros, baik dalam biaya rumah tangga istana maupun biaya operasional pejabat tinggi negara, hakim dan sekretaris. Istana yang megah, bangunan dan halaman yang luas, perabotan yang serba mahal dan mewah adalah bukti keborosan

yang dilakukan oleh para khalifah, amir dan pejabat tinggi negara (asan, 1967: 483). Gaji seorang pejabat tinggi pada masa itu mencapai 1.000 dinar/bulan (Amin, 1962: 13) atau setara dengan Rp. 864.000.000. Bahkan gaji gubernur Mesir, asan ibn ‘Ali al-Mardānī, pada awal abad IV H sebesar 3.000 dinar setara dengan Rp. 2.592.000.000. Para pedagang, tuan-tuan tanah dan pemilik properti besar, juga termasuk kelompok masyarakat yang boros. Rumah mereka sama besar dan mewah dengan rumah khalifah dan perdana menteri (alas, 1979: 138).

Adapun penghasilan masyarakat kelas menengah tergantung pada kebijakan penguasa, ditentukan oleh para umara dan perdana menteri. Rumah mereka tergolong baik dan hidup tidak terlalu mewah. Selanjutnya, kelas yang terbawah adalah masyarakat ekonomi lemah yang bekerja sebagai petani kecil, buruh, pedagang kecil, serta para pekerja kasar. Kehidupan mereka sangatlah sederhana. Sketsa kehidupan mereka dapat dilihat dari cerita seorang laki-laki fakir yang datang ke Ba rah pada abad IV H. Ia bekerja di bagian keuangan pada sebuah toko dan digaji 1/2 dirham/hari (Rp. 432.000/hari) dengan mendapat makan dan pakaian. Setelah lama bekerja, barulah gajinya dinaikkan menjadi 1 dirham/hari (Rp. 864.000) (alas, 1979: 138). Data penghasilan ini menunjukkan bahwa, pendapatan masyarakat kelas terbawah terlihat sangat kontras dengan pendapatan masyarakat menengah apalagi masyarakat kelas atas.

Walaupun para ulama dan fukaha termasuk dalam kelompok masyarakat kelas menengah, namun tingkat kehidupan para ulama juga terimbas oleh perbedaan tingkat kehidupan masyarakat. Secara umum, kehidupan para ulama pada waktu itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok: *Pertama*, kelompok ulama yang tidak mempunyai hubungan dengan khalifah dan para pejabat pemerintah atau pengusaha. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Di antara mereka adalah Abū Sulaiman al-Man iqi, tidak mampu membayar sewa rumahnya karena tidak memiliki uang (Amin, 1962: 14). Abū ‘Ali, seorang ahli bahasa dan sastrawan terkemuka, karena tidak ada seorang pun yang bersedia membantu kehidupannya, terpaksa menjual buku-bukunya untuk biaya kehidupan. *Kedua*, kelompok ulama yang mempunyai hubungan dengan khalifah dan para pejabat negara, atau para hartawan yang mempunyai kepedulian terhadap ulama. Mereka ini hidup berkecukupan, malah sebagiannya hidup dengan kaya raya, namun jumlah mereka sangatlah terbatas (alas, 1979: 134).

Perbedaan tingkat ekonomi kehidupan para ulama ini disebabkan oleh 2 (dua) hal: *Pertama*, kesempatan ulama berhubungan dengan para khalifah, sultan, amir dan perdana menteri yang berlomba untuk mendekati para ulama dan sastrawan, dengan harapan para ulama dan sastrawan tersebut akan menyebutkan nama mereka, atau karena ingin berbangga dengan majelis ilmu dan sastra yang mereka dirikan. *Kedua*, atau disebabkan perpindahan para ulama tersebut dari Bagdād dan sekitarnya ke wilayah-wilayah yang berdiri sendiri. Wilayah-wilayah tersebut berlomba-lomba memberdayakan para ulama dan sastrawan guna menarik perhatian terhadap daerah (Jamāluddīn, 1983: 52)

Selanjutnya adalah kelompok masyarakat kelas bawah yang paling termajinalkan dan berjuang untuk hidup. Mereka hidup dari sedekah dan kebaikan hati masyarakat. Mereka duduk meminta bantuan serta sedekah di pintu-pintu masjid, jalan umum, bahkan di toilet-toilet. Termasuk juga golongan ini adalah *muta amwifin* (pelajar tasawuf) dan *mutafaqqihin* (pelajar fikih) yang hidup dari harta $\frac{1}{4}$ wakaf dan bantuan para dermawan (alas, 1979: 139).

Konsekwensi dari perbedaan tingkat pendapatan ini memunculkan kesenjangan sosial yang sangat mencolok. Terdapat komunitas yang hidup mewah dan berpoya-poya sehingga merusak moral dan kejiwaan mereka. Pada sisi lain, muncul rasa dengki, suka berbohong dan mencuri bagi komunitas yang miskin. Selain itu, maraknya pengangguran dan tingginya tingkat kemiskinan, memunculkan 2 (dua) kondisi yang kontradiktif: *Pertama*, merebaknya para pencuri yang berkeliaran di pasar-pasar untuk mencari rezeki, bahkan memaksa para pedagang dan penduduk untuk membayar setoran. *Kedua*, pada sisi lain banyak muncul kecendrungan pada tasauf. Kegagalan dalam menghadapi kehidupan membuat sebagian masyarakat cenderung kepada kehidupan zuhud yang tidak mementingkan kehidupan di dunia ini. Dalam perspektif kelompok ini, bila tidak mendapatkan kehidupan dunia maka hendaklah mengejar kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Dalam bidang politik, kekuasaan dan kedaulatan Abbasiyah pun berakhir sejak akhir pemerintahan khalifah al-Muttaqī (khalifah ke-21 yang berkuasa pada tahun 329/940 - 333/944) dan awal kekhalifahan al-Mustakfi, (khalifah ke-22 yang berkuasa tahun 333/944 – 334/945). Maka kekuasaan pun berpindah tangan dari Dinasti Abbasiyah kepada Dinasti Buwaihi di bawah kekuasaan Ahmad ibn Buwaih (334/945) dengan gelar “*Mu’iz ad-Daulah ibn Buwail*”. Sedangkan kekuasaan yang masih tersisa di tangan para

khalifah Abbasiyah hanyalah kekuasaan keagamaan, tidak lagi sebagai penguasa politik.

Peristiwa pengambilalihan kekuasaan dari khalifah kepada Dinasti Buwaihi tampaknya tidak terlepas dari ketidakcakapan para khalifah pengganti pasca 5 (lima) khalifah besar Abbasiyah yaitu as-Saffah, al-Man'ur, al-Mahdī, Harūn ar-Rasyīd dan al-Ma'mūn. Selain itu juga munculnya dinasti-dinasti kecil di berbagai daerah provinsi akibat sulitnya mengontrol kekuasaan yang sangat luas. Kondisi ini diperburuk lagi dengan faktor kemewahan yang dinikmati para khalifah serta gaya hidup hedonis anak-anak khalifah yang berpengaruh terhadap menurunnya semangat dan etos Dinasti Abbasiyah.

Pada masa Dinasti Buwaihi, aliran Muktazilah kembali bangkit dan meraih perlindungan politik dari penguasa. Setelah sebelumnya, khalifah al-Mutawakkil mengumumkan larangan terhadap aliran Muktazilah. Masa pemerintahan al-Mutawakkil merupakan awal terkonsolidasinya aliran Ahli Sunah Waljamaah menjadi satu aliran resmi. Montgomery Watt menyebut masa tersebut dengan istilah awal proses "konsolidasi sunnisme". Ia menyebut tahun 850-945 sebagai satu proses perluasan bidang-bidang kesepakatan di mana masyarakat secara umum menerima doktrin religius dan doktrin hukum, suatu penerimaan doktrin tanpa syarat yang tidak pernah ditemukan bandingannya. (Watt, 1987: 181).

Sebagaimana al-Ma'mūn, seorang khalifah Abbasiyah yang menganut paham Muktazilah meraih dukungan politis dari kalangan kaum Syiah, maka kali ini pun dukungan terhadap Muktazilah datang dari keluarga istana Buwaihi yang menganut paham Syiah. Apalagi secara kebetulan, pada periode Buwaihi ini, Syiah dan Muktazilah sedang menghadapi tekanan dan pengucilan oleh kelompok besar Sunni –'Asy'ariyah yang dianut mayoritas umat Islam masa itu.

Orang-orang Muktazilah pada masa ini kembali menduduki pos-pos penting dalam kerajaan, seperti Abū Mu'ammad 'Abdullah ibn Ma'rūf yang menjadi hakim agung di Bagdād dan 'Abd al-Jabbār A'mad ibn 'Abd al-Jabbār (w. 415/1024) di wilayah Ray. Majelis-majelis pengkajian keagamaan yang bercorak rasionalistis semakin semarak dilaksanakan. Pada masa Buwaihi ini lahir ulama-ulama kenamaan seperti Abū Bakr al-Ikhsyārī dan Abū Husain al-Khayyā , yang dianggap sebagai nara sumber asli pemikiran mazhab Muktazilah.

Pada tahun 1055, bangsa Turki Saljūq mengusir Buwaihi dari istana Bagdād. Namun, peralihan pemerintahan tidak menggeser kedudukan Muktazilah dari lingkaran kekuasaan, khususnya pada

masa kesultanan pertama, Tugril. Hal ini terjadi karena sang wazir (perdana menteri) yang bernama al-Kundūri masih tergolong penganut setia paham Muktaẓilah. Bahkan atas perintahnya banyak pejabat pengikut Asy'ariyah ditangkap dan dipenjarakan. (Hodgson, 1974: 44).

Penguasa kalangan Dinasti Buwaihi menganut Syiah Isnā 'Asy'ariyyah mengikuti keyakinan Syiah yang dominan di tanah kelahiran mereka, Daylam. Penduduk Daylam terkenal sangat fanatik terhadap Syiah, sehingga daerah ini diidentikkan dengan Syiah. Secara geografis, Daylam terletak di dataran tinggi serta dikelilingi oleh pegunungan Elburz, sehingga sulit dijangkau oleh Dinasti Abbasiyah. Daerah ini melindungi semua golongan, terutama yang memiliki akar historis-kultural-keagamaan pada sejarah kerajaan Sasania, seperti golongan Syiah dan Dinasti Buwaihi (Mukti, 2007: 15)

Suatu kenyataan lain yang sangat menonjol dalam perkembangan pada masa Mu'iz ad-Daulah adalah, kalau Khalifah al-Mū'i' seorang Sunni maka keluarga Buwaihi adalah penganut Syiah Isnā 'Asy'ariyyah. Sedangkan daulah Samāniyah di Asia Tengah, daulah Ikhsyidiyah di Mesir, daulah Bani Hamdhan di al-Jazirah dan Syam tetap mempertahankan aliran Sunni. Akan tetapi, walaupun keluarga Buwaihi menganut aliran Syiah, mereka tidaklah memaksakan aliran itu kepada masyarakat. Setiap pihak mendapatkan kebebasan menganut aliran maupun keyakinan keagamaan yang diyakininya. Ulama-ulama Sunni juga ramai menghadiri majelis ilmu Mu'iz ad-Daulah.

Hanya saja, sebagai lambang kekuasaan Syiah dalam Dinasti Abbasiyah, maka hari-hari besar Syiah dijadikan hari besar resmi. Misalnya, tanggal 10 Muharram memperingati peristiwa Karbala serta 1 Dzulhijjah yang diperingati sebagai *Ya'um al-Gadīr*. Menurut kepercayaan Syiah, bahwa pada tanggal 1 Dzulhijjah, Nabi Mu ammad telah memberikan wasiat kepada 'Alī ibn Abī alib untuk mewarisi kekuasaan dunia dan akhirat sepeninggal beliau di suatu tempat bernama *Gadīr*. Namun, Bani Buwaihi tidak memegang teguh pandangannya dalam masalah ini (Watt, 1987: 225). Kedua upacara ini pernah dilarang sementara oleh A ud ad-Daulah dan 2 (dua) wakil gubernur sesudahnya, karena kedua acara tersebut telah memancing kerusuhan antara kaum Syiah dan Sunni di Bagdād.

Sikap bani Buwaihi ini didasari oleh prinsip Syiah Imamiyah yang didukung oleh kelompok berhaluan moderat. Mereka adalah orang-orang yang menghindari cara-cara revolusioner untuk menjatuhkan kaum Sunni yang berkuasa. Karenanya, selama Dinasti

Buwaihi berkuasa, mereka mempergunakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat propaganda politik. Akan tetapi, mereka gagal menyebarkan doktrin Syiah secara luas di masyarakat, karena pengaruh tokoh-tokoh Sunni sangat kuat pada waktu itu serta mayoritas penduduk Irāq dan Persia tidak mau menerima aliran Syiah di bawah pemerintahan mereka.

Dalam catatan sejarah, selama Dinasti Buwaihi berkuasa di Bagdād, pertikaian antar sekte aliran agama, pemberontakan tentara dan sebagainya selalu terjadi. Pada masa pemerintahan Mu'iz ad-Daulah, -walaupun ia mengembangkan sikap toleransi keagamaan dengan menjalankan kebijakan konsilasi keagamaan antara Sunni dan Syiah- tetap saja terdapat riak-riak yang menggambarkan intoleransi. Ketegangan-ketegangan antar aliran memang sudah memburuk sebelum Dinasti Buwaihi berkuasa. Dari sisi ini, maka tidak mengherankan jika kemunculan Dinasti Buwaihi sebagai pengendali kekuasaan dinyatakan semakin mempersulit masalah.

Salah satu contoh intoleransi adalah perampasan kekuasaan oleh golongan Sunni terhadap perkampungan Karkh yang Syiah. Peristiwa ini terjadi pada musim panas tahun 338/949, ketika Mu'iz ad-Daulah sedang tidak berada di ibu kota. Kerusuhan ini menelan banyak korban jiwa dan menyebar sampai ke perkampungan yang sebagian penghuninya adalah Syiah.

Berbagai fenomena sosial keagamaan yang terjadi pada masa Buwaihi di Bagdād selama dekade kedua dan ketiga dari abad ke-10 memang ditindak keras. Misalnya al- allāj, seorang sufi terkemuka yang mengajarkan doktrin *mi dah al-wujūd* dan *al- ulul* (peleburan dengan Tuhan) dihukum mati pada tahun 922. Tubuhnya digantung pada salah satu tiang gantungan di Bab a āq. Ketika telah banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan pandangannya, para fukaha melakukan perdebatan dengan al- allāj atas intruksi khalifah al-Muqtadir. Akhirnya, para fukaha mewajibkan untuk membunuh al- allāj dan 3 (tiga) orang pengikutnya yang tidak mau mengubah pendapat (Ibn al-A īr, 1966: 406-407).

Abd Mukti menuliskan, semua golongan keagamaan selalu berusaha berebut pengaruh. Setiap golongan berlomba-lomba menyiarkan ajaran-ajarannya, yang sering diwarnai oleh tindakan kekerasan terutama setelah ikut campur tangan penguasa. Ajaran Muktaizilah pernah dipaksakan pada masyarakat Islam melalui *mi nah* pada masa pemerintahan al-Ma'mun (w. 218/833) hingga al-Wā iq (w. 232/847). Selain itu, al-Kunduriy (416/1025-467/1054), wazir Thughril Beg (429/1038-455/1053) juga pernah memaksakan

ajaran Muktazilah pada masyarakat di wilayah kesultanan Saljūq. Sedangkan kaum Sunni pada masa itu berada pada pihak yang ditekan. Maka sebaliknya, sejak masa pemerintahan al-Mutawakkil, Dinasti Sāmāniyah, Ghaznawiyah dan Saljūq menjadi penguasa, mereka pun memaksakan ajaran Sunni kepada masyarakat. Adapun ajaran Syiah *I na 'Ayyariyyah* pernah dipaksakan oleh Dinasti Buwaihi (334/945-447/1055) sebagaimana Syiah *Ismā'iliyah* dipaksakan oleh Dinasti Fā imiyah (297/909-567/1171) (Mukti, 2007: 21).

Konstelasi sosial keagamaan yang sangat kosmopolitan ini, menjadikan al-Māwardī semakin sadar akan pentingnya paradigma berfikir yang tidak terkukung dengan ajaran agama yang kaku dan dogmatik. Karena itu, ia secara lantang menyuarakan arti peran dan otonomi akal sebagai dasar pemikirannya. Walaupun demikian, bukan berarti pemikiran al-Māwardī cenderung pada abstraksi spekulatif dan renungan murni filosofis yang tidak menyentuh kondisi riil kehidupan. Malah sebaliknya, nuansa orientasi kepraktisan dan aplikasi sangat kentara dalam pemikirannya.

D. Perkembangan Intelektual

Menarik sekali bahwa, ketidak stabilan politik pada abad IV dan V tidak menyebabkan kemunduran di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Seolah-olah ilmu dan politik tidak berjalan seiring, malah terjadi sebaliknya (Amīn, 1962: 2-3). Ketika politik tidak stabil ilmu pengetahuan malah lebih maju dan lebih matang dari waktu sebelumnya. Pada saat kekuasaan Abbasiyah dianeksasi oleh kekuatan lain, perkembangan kehidupan intelektual tetap memperoleh kemajuan. Bahkan sebaliknya, kemunculan dinasti-dinasti otonom ini justru berfungsi sebagai penyangga (*buffer state*) bagi Dinasti Abbasiyah. Dinasti-dinasti ini berperan besar dalam mengembangkan transmisi keilmuan Islam dengan adanya patronase dari penguasa (*amir*) dinasti-dinasti otonom di berbagai wilayah.

Pada saat Dinasti Abbasiyah dikuasai oleh Dinasti Buwaihi yang memperlakukan para khalifah Abbasiyah sebagai penguasa boneka, kekuasaan khalifah hanya terbatas pada kekuasaan spiritual dan sekedar sebagai lambang kesatuan umat saja. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan tetap berlangsung bahkan memperoleh puncaknya pada masa Dinasti Buwaihi. Para ilmuwan mulai mengelaborasi ilmu yang telah tumbuh dan menyusun berbagai teori yang terpencar-pencar dalam berbagai buku. (Amīn, 1962: 97)

Tentu saja, suatu peristiwa tidak muncul hanya disebabkan satu faktor saja. Ia memiliki banyak faktor yang keseluruhannya

menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa. Di antara faktor-faktor tersebut, ada yang menjadi faktor utama, faktor pendukung, penyebab langsung terjadinya peristiwa serta ada pula yang menjadi penyebab tidak langsung atau disebut sebagai akar permasalahan. Demikian juga dengan perkembangan ilmu pada masa Dinasti Buwaihi. Tingginya kuantitas perkembangan ilmu pada masa ini, bukanlah disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan disintegrasi bangsa, walaupun hal ini dapat disebut sebagai penyebab langsung. Namun, perkembangan ilmu tentunya adalah konsekuensi logis dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berjalan sebelumnya.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Buwaihi: pertama, tumbuhnya berbagai kota ilmu dan budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad IV ini muncul karena persaingan sehat antara ulama dan pemberian insentif yang memadai kepada para ulama oleh penguasa negeri yang telah memisahkan diri. Hal ini bertujuan agar para ulama mau bergabung ke negara mereka. Sebelum berdirinya negara-negara kecil, kota Baghdād adalah satu-satunya pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang termasyhur. Namun, setelah munculnya negara-negara bagian, maka setiap ibukota negara bagian tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang diperhitungkan (Amīn, 1962: 94). Sehingga pusat ilmu pengetahuan tersebut saling bersaing. Selain Baghdād sebagai kota besar, muncul pula kota-kota lain seperti, Cordova, Kairo dan Bukhara. Di daerah bani Buwaihi juga muncul kota ilmu pengetahuan selain Ba rah dan Kufah, yaitu Rayy, I fahān dan Syirāz, sehingga kota-kota ini menjadi tujuan para ulama, penyair dan penulis yang selalu berpindah antar kota untuk menuntut ilmu dan mencari penghasilan (asan, 1967: 69)

Kedua, pertumbuhan majelis-majelis ilmu. Sebagian para amir dan wazir saling berlomba membangun majelis ilmu sebagai wujud aktualisasi kekuasaan mereka. Para ulama diminta untuk memberi petunjuk dan pendapat dalam berbagai masalah pemerintahan serta menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang terhormat. Mereka diberikan bantuan materi untuk membantu kehidupannya. Pada masa ini, majelis ilmu tersebut dapat klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu majelis *al-umara'*, majelis *al-wuzara'* serta majelis *al-ulama'*.

Ketiga, perkembangan Perpustakaan dan *Dār al-'Ilmi*. Para *umara'*, *wuzara'* serta orang-orang kaya berlomba-lomba mendirikan perpustakaan. Diantaranya adalah perpustakaan A ud ad-Daulah

dan ibn al-‘Amīd yang telah mengangkat Ibn Miskawaih sebagai penanggung jawab perpustakaan. Selain itu juga, para dermawan banyak mendirikan perpustakaan di masjid-masjid. Perpustakaan ini dibangun sebagai cikal bakal asrama yang akan menerima anak murid (Syalabī, 1987: 181). Di samping perpustakaan, juga terdapat *dār al-‘ilmi* yang juga ikut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Dinasti Buwaihi. *Dār al-‘ilmi* adalah lembaga pendidikan untuk umum selain sebagai tempat penulisan buku, menerjemah dan mengarang.

Di antara penguasa Dinasti Buwaihi, hanya Mu‘iz ad-Daulah (334/945-356/967), Saif ad-Daulah (356/967-367/978) dan A ud ad-Daulah (367/978-372/983) yang dikategorikan kuat. Ketiganya sebagaimana khalifah pada masa Dinasti Abbasiyah, terkenal sebagai pecinta dan pelindung filsafat, ilmu pengetahuan serta kebudayaan (Mukti, 2007: 48).

Kemajuan dan kejayaan Dinasti Buwaihi diperoleh ketika pemerintahan A ud ad-Daulah (367/978-372/983). Philip K. Hitty bahkan menyebutnya sebagai “*the greatest Buwaihid*” dan “*the most illustrious ruler of this time*” (penguasa paling termashur di masanya). Ia memperindah kota Bagdād, memperbaiki dan membuat saluran air, mendirikan masjid negara, rumah sakit umum dan gedung-gedung pemerintahan. Gedung yang paling menarik adalah sebuah rumah sakit umum yang diberi nama *Bīmāristān A ud ad-Daulah*. Rumah sakit tersebut dibangun dengan menelan biaya 100.000 dinar atau dua juta dirham, berarti ini setara dengan Rp. 86.400.000.000; memiliki 24 dokter ahli yang sekaligus menjadi guru besar di fakultas kedokteran (Hitty, 1974: 471).

Selain bangunan fisik, pengembangan ilmu pengetahuan dan sastra juga mendapat perhatian yang besar pada masa ini. Terlebih lagi, banyak di antara keluarga Buwaihi yang menjadi sastrawan dan budayawan seperti A ud ad-Daulah, ‘Izzu ad-Daulah dan Taj ad-Daulah (Amīn, 1962: 255). A ud ad-Daulah ibn Buwaihi memberikan patron yang sangat besar terhadap para ulama fikih, hadis dan teolog. Ia menyediakan perpustakaan yang sangat representatif untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan di rumahnya. Demikian juga Ibn Sīnā, kabarnya ia selalu tinggal dalam perpustakaan Nūh ibn Mansūr as-Samāni yang penuh dengan berbagai buku yang lengkap.

Kontribusi penting masa kepemimpinan Dinasti Buwaihi dalam bidang intelektual adalah terwujudnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, di antaranya; astronomi, kedokteran, filsafat, bahasa, sastra serta ilmu-ilmu *syar’i*. Pertama,

astronomi (ilmu falak). Dalam bidang astronomi dikenal ilmuwan-ilmuwan seperti, Abū al-Qāsim ‘Alī ibn al-Asan yang terkenal dengan Ibn al-A‘lām (w. 375/979). Syarif ibn al-A‘lām telah menciptakan beberapa tabel astronomi yang telah digunakan selama tiga ratus tahun. A ud ad-Daulah sendiri selalu berkonsultasi dengannya dalam membuat rencana dan program-program. Waihan ibn Wasyam Abū Sahal al-Kūhīy adalah kepala observatorium yang didirikan oleh Saif ad-Daulah al-Buwaihi di taman istana Bagdād (aif, 1990: 288). Ilmuwan lain yaitu ‘Abd ar-Ra mān ibn Amru ibn Sahal Abū al-Husein a - ūfi ar-Rāzīy. Ia mendirikan observatorium bernama observatoriun ‘Abd ar-Ra ām a - ūfi di Syiraz serta mengarang banyak buku di antaranya tentang astronomi (Nasr, 1986: 62).

Kedua, kedokteran. Berbagai buku telah diterbitkan dalam bidang kedokteran. Begitu juga sekolah-sekolah kedokteran selalu didirikan sekitar rumah sakit. Al-Bimāristān yang terkenal pada masa Dinasti Buwaihi adalah yang dibangun oleh A ud ad-Daulah. Menurut Ibn Khallikān, Bimāristān ini adalah rumah sakit terbaik yang tiada taranya pada masa itu, baik dari segi media maupun sarananya (Khallikān, tt: 54). Selain berfungsi sebagai rumah sakit, al-Bimāristān ini juga digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu kedokteran. Ia juga mendirikan organisasi kedokteran yang dipimpin Jibrā’īl ibn ‘Abdullah ibn Bakhtīsyū yang diberi gaji sebesar 300 *syaja’r* (*adudi*) dirham per dwi bulan ditambah 300 dirham sebagai tunjangan profesi. Jibrā’īl dikenal dengan karyanya dalam bidang kedokteran, thesisnya *al-Kāfi* yang salah satu copinya dipersembahkan untuk *Dār al-‘Ilmi* di Bagdād. Salah seorang ahli dalam bidang kedokteran adalah ‘Alī ibn al-‘Abbās al-Majūsī, berasal dari Persia, yang dikenal di Barat sebagai Hāly ‘Abbās. Ia mengkompilasi ensiklopedi kedokteran *Adudi Kunnāsy* (juga dikenal sebagai *buku al-Malakī* atau dalam bahasa latin *Liber Regius*). Buku ini dibuat sebagai persembahan kepada A ud ad-Daulah ibn Buwaihi. Sebelum muncul buku Ibnu Sīnā, *al-Qānūn*, buku tersebut sangat banyak dibaca orang. Namun, setelah *al-Qānūn* muncul, para ahli lebih suka membaca buku *al-Qānūn*. Hal ini terjadi karena buku *al-Malakī* lebih menekankan pada bidang praktis, sedangkan *al-Qānūn* lebih menekankan pada kajian teori dan keilmuan.

Ketiga, filsafat. Dalam bidang filsafat muncul filosof terkemuka al-Fārābī yang diberi gelar *mu‘allim anī* setelah Aristo (aif, 1990: 282). Lalu berlanjut dengan Ibnu Sīnā dan Bairuni di Iran dan Ibn Haitsam di Irak. Ibnu Sīnā juga merupakan filosof terkemuka

yang digelar *mu'allim ketiga* setelah Aristo dan al-Fārābī. Ungkapan Ibn Sīnā yang terkenal mengatakan “sudah cukup banyak buku yang memberikan komentar terhadap aliran-aliran terdahulu, waktunya bagi kita untuk menyusun filsafat kita sendiri”. Sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa Ibn Sīnā berbeda dengan Aristo, Plato serta filosof Yunani lainnya, sehingga ia menjadi filosof independen sesuai dengan teori dan pemikirannya sendiri.

Selain itu juga muncul Ikhwān a - afā, kelompok filosof rahasia yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah di Ba rah. Kelompok ini telah menyusun pemikiran mereka dalam 50 (lima puluh) risalah yang diberi nama “*Rasāil Ikhwān a - afā wa Khalān al-Wafā*”. Risalah ini ditulis oleh banyak ilmuwan sebagai sebuah tim. Namun yang mengedit hingga beredar di pasar buku Bagdād adalah Abū Sulaimān al-Maqdisī. Peredaran buku ini secara luas di tengah masyarakat mengindikasikan bahwa filsafat beredar secara luas di masyarakat khususnya para intelektual.

Keempat, ilmu bahasa dan kesusastaan. Bidang yang sangat tinggi pencapaiannya pada masa Dinasti Buwaihi adalah kesusastaan, khususnya kesusastaan Arab. Para penguasa Dinasti Buwaihi banyak yang menjadi penyair atau paling tidak memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, di antaranya A ud ad-Daulah, ‘Izz ad-Daulah Abū Man ūr Bakhtiyār ibn Mu’iz ad-Daulah dan Tāj ad-Daulah Abū al- usein A mad ibn A ud ad-Daulah. Majelis ilmu di istana A ud ad-Daulah ini selalu dihadiri oleh penyair-penyair terkenal, di antaranya adalah al-Mutanabbī (aif, 1990: 341) Para perdana menteri juga berlomba-lomba mengundang sastrawan ke majelis mereka. Di antaranya adalah al-Mahlabī, perdana Menteri Mu’iz ad-Daulah dan Sābur ibn Ardasyīr perdana menteri ‘A ud ad-Daulah (aif, 1990: 324).

Sastrawan terkemuka yang hampir tidak ada tandingan pada masa ini adalah Ibn ‘Amid yang digelar al-Jahizh II. Muridnya, Shāhib ibn ‘Abbād yang juga seorang sastrawan terkenal, memberi sanjungan kepada Ibn ‘Amid dengan menyatakan, “penulisan dimulai oleh ‘Abd al-Hamid dan diakhiri oleh Ibn ‘Amid” (Khallikān, tt: 104). Selain kedua guru dan murid tersebut juga ada sastrawan lain yaitu Abū al- asan Mu ammad ibn ‘Abdullāh as-Salāmī, Abū al-Farj ‘Abd al-Wāhid ibn Nas al-Ma’ruf yang terkenal dengan al-Babbaghā’ dan Abū Na r ‘Abd al-‘Aziz ibn Mu ammad ibn Nubātah yang dikenal dengan Nubātah al-Sa’di (aif, 1990: 337).

Kelima, ilmu-ilmu *Syar'i*. Dalam bidang fikih muncul tokoh-tokoh ulama mazhab fikih di antaranya, Abū al- asan Ubaiyyah al-Karhi (w. 340/944) dari mazhab Hanafi, Abū al- asan 'Ali ibn A mad al-Baghdādī yang terkenal dengan Ibn al-Qa ar (w. 398/1002) dari mazhab Maliki, Abū al- asan 'Ali ibn 'Umar al-Baghdādī al-Daruqu nī (w. 385/989) dan Abū al- asan al-Māwardī (w.450/1058) dari mazhab Syafii. Sedangkan dari mazhab Hanbali tidak ditemukan tokoh terkemuka pada masa Dinasti Buwaihi (asan, 1967: 393).

Tafsir yang berkembang di Iraq pada masa ini ada beberapa corak, di antaranya tafsir *fiqhi*, tafsir *i'tizālī*, tafsir *sunni* dan tafsir *syi'i*. Di antara ahli tafsir pada masa ini adalah Ibn al-Ja ā A mad ibn 'Ali (w.370/974), al- arrāsī keduanya merupakan ahli tafsir fikih. Ahli tafsir bercorak Muktaẓilī misalnya 'Ali ibn 'Īsa ar-Rūmmānī al-Mu'tazilī (w. 384/988), sedangkan tafsir Sunni merupakan kelanjutan dari Tafsir a - abari oleh imam Abū Ja'far ibn Jarīr a - abari. Selanjutnya ahli tafsir *syi'i* yaitu asy-Syarīf Rī ā (w. 406/1010) serta Abū Ja'far Mu ammad ibn al- asan a - usī (460/1064).

Bidang hadis juga mendapat perhatian yang baik di Bagdad. Di antara ilmuwan bidang hadis adalah al-Barrāz Mu ammad ibn 'Abdullah (w. 354/958), Abū Bakr Mu ammad ibn usein (w. 360/964), 'Ali ibn 'Umar ad-Dāruqutnī (385/989, al-Kalābāzī A mad ibn Mu ammad (398/1002), al-Khatīb al-Baghdādī dan A mad ibn 'Ali ibn ābit (463/1067). Adapun tokoh ilmu kalam yang bermazhab Asy'ari adalah al-Baqillānī, Mu ammad ibn a - ayyib al-Ba rī, Abū Man ūr al-Māturīdī (w. 332/936), Abū al-Qāsim al- akīm as-Samarqandī (w. 342/942) serta 'Abd al-Karīm ibn Mūsā al-Bazdawī (w. 390/994).

Dinamika intelektual pada masa Dinasti Buwaihi ini mayoritas dimotori oleh individu-individu maupun lembaga-lembaga yang secara sukarela dan mandiri berkecimpung dalam bidang-bidang tertentu. Salah satu lembaga keilmuan yang hidup pada masa ini adalah lembaga pendidikan Ya ya ibn 'Adi. Lembaga ini berkonsentrasi pada bidang filologi dengan aktifitas-aktifitas penyalinan, penerjemahan, penyuntingan teks-teks filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan kuno. Pembelajaran dilakukan secara kelompok dengan metode diskusi dan ceramah terhadap materi teks dari sisi filsafat tanpa memfokuskan pada aliran-aliran tertentu.

Uraian di atas menggambarkan bahwa kepemimpinan Dinasti Buwaihi telah memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan ilmu dan budaya. Sebagian dari mereka adalah

budayawan yang memiliki wawasan yang luas. Suatu hal yang menarik dari sejarah Dinasti Buwaihi ini adalah persyaratan untuk memilih seorang perdana menteri yang didasarkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu kemampuan manajemen dan kemampuan ilmu *balaghah* (Amin, 1962: 255). Oleh karena itu, perdana menteri yang diangkat adalah budayawan-budayawan terkemuka, seperti Ibn al-‘Amīd, Ibn ‘Abbad, al-Mahlabi, Sābur ibn Ardisyir dan Ibn Sa’dān.

Setelah bani Buwaihi mengalami masa kemunduran dan kelemahan, muncullah bangsa Turki Saljūq. Penguasa baru ini juga menjadikan khalifah sebagai penguasa boneka. Sekalipun mereka menentukan jalannya pemerintahan, namun urusan menjalankan roda pemerintahan dipercayakan kepada wazir. Wazir yang terkenal dalam Dinasti Saljūq ini adalah Ni ām al-Mulk. Salah satu pusat keilmuan yang monumental adalah adanya lembaga tinggi pendidikan Islam bernama madrasah Ni āmiyah yang diprakarsai oleh wazir Ni ām al-Mulk. Adapun guru besar pada madrasah ini dipercayakan kepada Imam al-Gazālī (Khallikan, tt: 217).

D. Penutup

Bani Buwaihi telah memberikan andil yang sangat besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun mereka keturunan Persia, namun tetap mengembangkan ilmu bahasa Arab dan berbagai ilmu lainnya yang juga dalam bahasa Arab. Selain itu, suatu hal yang sangat patut dibanggakan pada masa pemerintahan bani Buwaihi adalah pemilihan seorang perdana menteri berdasarkan kepada dua sisi, yakni kemampuan manajerial dan kemampuan intelektual.

Perkembangan ilmu pada masa dinasti Bani Buwaihi adalah konsekwensi logis dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berjalan lama. Mulai dari usaha penerjemahan, keterbukaan terhadap budaya lain dan pergesekan antara berbagai aliran pemikiran yang terjadi dalam umat Islam sendiri. Selain itu, terdapat 2 faktor utama yang langsung mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti bani Buwaihi. *Pertama*, maraknya majelis-majelis ilmu yang didirikan oleh berbagai amir dan wazir. Majelis ilmu ini dapat dikelompokkan kepada 3 bentuk: *majlis al-umara’*, *majelis al-wuzara’* dan *majelis al-‘ulama*. *Kedua*, perpustakaan dan Dar al-‘ilm. Para ulama dan wuzara’ serta banyak orang kaya berlomba-lomba mendirikan perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amīn, A mad. *Uḥḍa al-Islām*. Mesir, Maktabah an-Nah ah al-Mi riyah, tt.
- , *Uḥḍa al-Islām*. Kairo, Maktabah an-Nah ah al-Mi riyah, 1962.
- aif, Syaūqī. *Tārikḥ al-‘Adāb al-‘Arabī: ‘Asḥr ad-Duḡāl wa al-Imārāt: al-Jazīrah al-‘Arabīyah, al-‘Irāq wa ‘Irān*, cet 3. Kairo, Dār al-Ma’arif, 1990.
- asan, asan Ibrāhīm. *Tārikḥ al-Islām as-Siyāsī wa ad-Dīnī wa a - aqāfī wa al-Ijtima’ī*. Kairo, Maktabah an-Nah ah al-Mi riyah, 1967
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. London, McMilan Press, 1974.
- Hodgson, Marsall G.S. *The Venture of Islam*. Chicago, University of Chicago Press, 1974.
- Ibn al-A ‘īr, *al-Kamil fī at-Tārikḥ*. Beirut, Dār ādir li al- ibā’at wa an-Nasyr, 1486/1966.
- Ibn Khallikān, Abū al-Abbas Syams ad-Dīn A mad ibn Mu ammad ibn Abī Bakr *Wafayāt al-A’yān wa Anbā’ Abnā’ aṣ-Zamān*. Ditahqiq oleh I sān ‘Abbās. Beirut-Libanon, Dār as-Saqāfah, tt
- Ibn Miskawih, *Tajārūb al-Umam*. Kairo, Dār al-kitāb al-Islāmī, tt`
- Mufradi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Mu ammad As’ad alas, *Tārikḥ al-‘Arab*, Beirut, Dār al-Andalus, 1979
- Mukti, Abd. *Konstruksi Pendidikan Islam, (Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhāmiyah Dinasti Saljūq)*. Bandung, Citapustaka Media, 2007.
- Nādiyah Jamāluddīn, *Falsafah at-Tarbiyah Inda Ikhwān a - afā’*. Kairo, al-Markaz al-‘Arabī li al- ahāfah, 1983
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, The Islamic Texts Society, 1987.
- Syalabī, A mad. *Mausū’at at-Tārikḥ al-Islām wa al-Ha ārah al-Islāmiyah* Kairo, Maktabah an-Nah ah al-Mi riyah, 1974
- , *at-Tarbiyah wa al-Ta’līm fī al-Fikr al-Islāmī*, cet.8. Kairo, Maktabah an-Nah ah al-Mi riyah, 1987.